



Di Indonesia, kemiskinan merupakan hal klasik dalam perjalanan sejarahnya. Di Jawa timur, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur telah tercatat 5 kabupaten atau kota termasuk kategori sangat miskin, 11 kabupaten termasuk kategori mendekati miskin dan 22 kabupaten merupakan kategori miskin, termasuk Kabupaten Lamongan. Data statistik tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lamongan hampir 1,5 juta jiwa. Adapun jumlah rumah tangga miskin sebanyak 84.694 atau sekitar 21,5 persen dari jumlah penduduk.<sup>2</sup>

Kemiskinan merupakan permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian khusus dalam penyelesaiannya. Baik itu dari masyarakatnya langsung ataupun juga dari pemerintah. Baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Artinya dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah mengakar kuat ini harus melibatkan segala aspek dan lapisan dalam masyarakat. Karena suatu masalah sekecil apapun jika tidak ditangani dengan tindakan yang mengena, maka hanya akan menimbulkan permasalahan lainnya.

Penanganan masalah kemiskinan sampai saat ini terasa hanya mengalihkan masyarakat pada ketidakberdayaan di sisi lainnya. Hal ini dapat dilihat jelas pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah pemberian sembako atau raskin kepada masyarakat golongan bawah. Memang dalam jangka pendek, bantuan tersebut dapat

---

<sup>2</sup> Slamet HP., *Gemerlap Untuk Tumbuhkan Ekonomi Pedesaan di Lamongan* (<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/76152/gemerlap-untuk-tumbuhkan-ekonomi-pedesaan-di-lamongan>, diakses pada 23 April 2012)

menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. Tetapi sebenarnya hal ini telah mendorong masyarakat untuk menjadi pribadi peminta dan tergantung. Bukan menciptakan kemandirian dan menggiring mereka ke wilayah keberdayaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pada pemberian subsidi BBM. Kalau dianalisis lebih jauh, upaya tersebut tidak membantu masyarakat yang dianggap miskin. Tetapi malah menguntungkan golongan menengah ke atas. Karena sesungguhnya BBM dikonsumsi oleh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Kemudian, apakah masyarakat miskin di Indonesia secara rata mempunyai kendaraan bermotor. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor permasalahan kemiskinan tidak memiliki ujung. Apalagi saat ini sulit untuk dibedakan antara masyarakat yang benar-benar miskin dengan yang menamakan dirinya miskin. Sehingga dalam penanganannya dibutuhkan rencana penyelesaian yang strategis.

Jika dari pemerintahan pusat sudah ada upaya yakni dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), maka tidak hanya cukup dengan itu. Dari pemerintahan daerahpun harus ada program khusus. Hal inilah yang sekarang sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Selain menfokuskan pembangunan daerah pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, Pemerintah Daerah Lamongan juga memandang pembangunan ekonomi. Karena pembangunan apapun tidak akan berhasil sepenuhnya jika pembangunan masyarakatnya dikesampingkan termasuk ekonomi masyarakat. Sehingga pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana



Kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera yaitu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan dasar. Dengan demikian kesejahteraan merupakan tujuan dari program pembangunan, baik itu pengembangan maupun pemberdayaan. Sebagai sebuah tujuan, untuk mencapainya diperlukan usaha-usaha yang disebut dengan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS). Salah satu PKS yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lamongan yakni dengan pelaksanaan program Gemerlap tersebut.

Program Gemerlap dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat di pedesaan sesuai dengan potensi daerah dan minat masyarakat. Misalnya saja pemberian bantuan itik sebanyak 4000 ekor pada beberapa desa di Kecamatan Turi yang memiliki potensi sebagai sentra untuk pengembangan ternak itik. Begitu juga dengan Kecamatan Karang Geneng yang diberikan bantuan ikan patin dan panami. Kecamatan Mantup yang menerima bantuan kambing, juga Kecamatan Sambeng yang diberikan bantuan berupa ikan lele dumbo bermedia terpal.

Meskipun sudah berjalan selama satu tahun ini, program Gemerlap masih belum merata ke 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Namun sudah sekitar setengah dari keseluruhan kecamatan di Lamongan yang sudah terjamah. Belum meratanya pelaksanaan Gemerlap ini disebabkan oleh benturan penggunaan dana APBD Kabupaten Lamongan. Apalagi pembangunan Kabupaten Lamongan juga difokuskan pada perbaikan jalan.











pengumpulan data, teknik validasi data dan yang terakhir adalah tentang analisis data.

#### **BAB IV PROFIL LOKASI**

Profil lokasi merupakan bab yang berisi deskripsi mengenai profil umum kajian dalam penelitian. Dalam hal ini berisi tentang profil program Gemerlap dan profil kelompok penerima bantuan hibah.

#### **BAB V PENYAJIAN DAN ANALISA DATA**

Dalam bab ini disajikan data-data temuan di lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian. Data temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam bab II. Data tersebut meliputi proses pelaksanaan program Gemerlap di Desa Ardirejo dan Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten serta tingkat efektivitas dan efisiensi program tersebut.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab penutup ini mengakhiri dari pembahasan penelitian. Pada bab ini disajikan dalam dua bentuk yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran atau rekomendasi dari peneliti.